

PPKM Diperpanjang Lagi

JAKARTA (KR) - Pemerintah memutuskan melakukan perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Skala Mikro (PPKM Mikro), selama dua minggu, mulai tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2021. Hal tersebut untuk menjaga tingkat pengendalian kasus Covid-19 dan meningkatkan efektivitas pengendalian penyakit tersebut di tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 (KPCPEN) pada kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/4).

"Pemerintah memperbesar provinsi yang ikut PPKM (Mikro), yaitu dengan data yang ada baik itu terkait dengan kasus sembuh, meninggal, aktif, kemudian total kumulatif kasus maka pemerintah menambahkan lima daerah lagi yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada dua puluh provinsi," ujar Airlangga.

Sebelumnya PPKM Mikro Periode IV yaitu tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April, telah dilakukan pembatasan di lima belas provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro kembali akan diperpanjang sampai 19 April mendatang. Keputusan terkait dengan perpanjangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Gubernur DIY No 10/INSTR/2021 yang ditandatangani Sultan pada 5 April kemarin. **(Sim/Ria/Ira)-d**

Tarawih Sambungan hal 1

Muhadjir meminta agar pelaksanaan ibadah salat berjemaah tersebut juga harus dilakukan secara terbatas pada lingkup komunitas. Artinya jemaah saling kenal satu sama lain. "Jadi di lingkup komunitas di mana para jemaahnya memang sudah dikenali satu sama lain, sehingga jemaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan," tegasnya.

Menko PMK menambahkan, dalam melaksanakan salat berjemaah agar diupayakan untuk dilakukan sesimpel mungkin dan tidak memakan waktu terlalu lama mengingat pandemi Covid-19 masih terjadi penularan dan belum hilang.

Selain itu, Muhadjir juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya kerumunan, terutama pada pelaksanaan salat Idul Fitri. "Supaya menjaga untuk tidak terjadi kerumunan, konsentrasi orang terutama pada saat sedang akan datang menuju ke tempat salat jemaah, baik itu di lapangan maupun di masjid maupun ketika saat bubar dari salat jemaah supaya dihindari adanya kerumunan yang terlalu besar," kata Muhadjir. **(Sim/Ati)-d**

Kurangi Sambungan hal 1

penyelesaian kegiatan penanganan dampak gempa bumi Lombok 2018. Selain meresmikan Masjid Al Mujahidin di Embar-Embar, Bayan Lombok Utara, juga meresmikan fasilitas air bersih di Desa Gumantar Bayan Lombok Utara, juga sekaligus menyerahkan bantuan penanganan dampak gempa Lombok melalui PMI NTB.

Oleh Ridwan, bantuan pembancr KR sebesar Rp 20 juta diserahkan kepada Pondok Pesantren Al Ishlah. Pondok tersebut menurut Ridwan masih terus membangun kembali bangunan mereka yang rusak. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Setelah penyerahan bantuan dana, Dirut KR juga meninjau Ponpes Al Ishlah yang mengelola berbagai tingkat pendidikan, dari PAUD, SDIT hingga panti asuhan, Selasa (30/3). Menurut TGH Zakaria, bantuan dari Pembaca KR ini akan dimanfaatkan dengan baik, untuk melanjutkan pengembangan pendidikan. Karena setelah gempa, masih banyak kekurangan fasilitas yang perlu dibangun. **(Jon)-d**

Sultan: Sambungan hal 1

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso menyampaikan, pihaknya bersama Kepolisian, TNI, Perguruan Tinggi dan beberapa organisasi kemasyarakatan terus melakukan pembinaan kepada generasi muda maupun masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan kebhinnekaan. Upaya itu untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran paham radikal di DIY.

"Dari kegiatan ini, besar harapan kita dapat mencegah paham radikal berkembang di DIY. Karena dengan memahami Pancasila dan kebhinnekaan, *mindset* atau pola pikir tentang NKRI akan berada dalam setiap langkah, gerak dan jiwa masyarakat," tegasnya.

Plt Kepala Biro Hukum Setda DIY ini menyampaikan, pihaknya tidak bisa memantau perkembangan semua ormas yang ada di DIY karena sistem pendaftaran ormas ada di Pemerintah Pusat dan tidak pernah memberikan tembusan kepada Pemda DIY. Tetapi Badan Kesbangpol DIY bersama Kepolisian tetap berusaha melakukan pendataan meski ada kesulitan. **(Ria/Ira)-d**

FESTIVAL EKONOMI KEUANGAN DIGITAL INDONESIA (FEKDI) 2021

Barometer Perkembangan Ekonomi Keuangan Digital

JAKARTA (KR) - Sebagai salah satu langkah konkrit dalam mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, baik di pusat maupun di daerah, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) bersama Kementerian/Lembaga, asosiasi dan pelaku industri menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021, yang merupakan perhelatan pertama di Indonesia.

Mengangkat tema "Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia", FEKDI digelar selama 4 hari berturut-turut pada 5-8 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawancara pimpinan (leader's insight), dan gelar wicara (talkshow). FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan acara, juga dilakukan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021. Pembentukan Satgas P2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk: (i) mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan



KR-Istimewa

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan.

daerah, serta (ii) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Dalam rangka penguatan koordinasi antara Pusat dan Daerah, di tingkat daerah juga dibentuk Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang diketuai oleh Kepala Daerah. Jumlah TP2DD yang telah terbentuk sebanyak 135 baik di tingkat Provinsi maupun Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam pembukaan acara menyampaikan, BI mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional

Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standarisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital disusun dengan memerhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Strategi Nasional Ekonomi Digital, tambah Menko Airlangga, yang ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital serta dukungan kebijakan dan regulasi bertujuan untuk mewujudkan visi uta-

Banjir Sambungan hal 1

Bahkan, tak sedikit warga yang mencari rumah yang memiliki genset untuk sekadar mengecak telepon seluler. Mereka rela membayar Rp 5.000 perjam untuk mengecak HP. Aditya, seorang mahasiswa mengaku membayar Rp 5.000 untuk bisa mengecak HP. "Ini agar bisa berkomunikasi dengan orangtua," katanya.

Terdapat titik tertentu yang bisa mendapatkan sinyal. "Dalam Kota Kupang ada sinyal seluler," katanya. Di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan penanganan bencana banjir bandang dan longsor di NTT dan NTB. "Saya telah memerintahkan Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik, seperti bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta perbaikan infrastruktur," kata Presiden.

Bencana Sambungan hal 1

di kawasan Gejayan, Janti, seputar ringroad utara dan jalan Solo. Billboard dan balihoo yang ditancapkan di ruang publik, seperti disebut warganet menjadi kehilangan fungsi dan bentuknya sebagai ILR.

Tanda-tanda zaman akan munculnya bencana visual, sejati sudah lama menunjukkan gejala pergerakannya. Hal itu tampak dari penurunan kualitas ruang publik. Yogyakarta dan kota besar lainnya menjadikan ruang publik sebagai ruang bersama untuk menampung sampah visual iklan komersial maupun iklan politik. Perilaku ceroboh yang dijalankan pejabat-pengelola pemerintahan, memunculkan dampak ergonomi visual dan amburadulnya tata kelola kota.

Sekarang ruang publik menjadi ruang patembayatan sosial tidak ramah lingkungan dan nir-ramah visual bagi warganya. Ruang publik menjadi ruang terbuka tidak manusiawi. Dikatakan demikian,

karena ruang publik yang terdiri ruang terbuka hijau, taman kota dan trotoar untuk pejalan kaki, secara sepihak diberi stempel merek dagang produk barang dan jasa. Sementara penggal jalan lainnya, dikuasai partai politik lewat iklan politik yang ditancapkan di ruang publik.

Datangnya bencana visual ini dipicu pemikiran pragmatis, pemilik merek produk barang, biro iklan dan tukang pasang ILR. Mereka secara agresif berburu tempat strategis untuk menancapkan ILR agar target marketing komunikasinya terpenuhi.

Sementara itu, anggota Dewan serta pemerintah lewat dinas terkait yang memiliki tugas untuk mengurus masalah perizinan dan pajak reklame juga memiliki andil atas bencana visual ini.

Mereka berpikir pendek untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari uang perizinan serta pajak reklame. Pola pikir

cupet seperti itu secara sengaja menisbikan pola harmonisasi yang harus dijalankan parapihak terkait penetrasi visual ILR di ruang publik. Untuk mengantisipasi datangnya bencana visual, sudah saatnya unsur Pentahelix membangun kesadaran bersama guna mengatur penempatan ILR sesuai peruntukannya. Pemerintah, industri kreatif, media, komunitas dan kampus, wajib menjalankan kerja kolaborasi secara bertanggungjawab. Pola kerja semacam itu seyogyanya segera diwujudkan. Harapannya tercipta ekologi visual dan estetika kota yang bebas dari cengkeraman teroris visual ILR. Ketika dapat diwujudkan tim Pentahelix, pada titik ini, penempatan dan pemasangan ILR tidak mendatangkan bencana visual. Selain itu, secara psikologis, masyarakat tidak diteror target capaian PAD.

Terpenting, dalam sudut pandang budaya visual dan komunikasi publik, ILR dapat didekonstruksi secara visual sebagai bagian untaian dekorasi kota yang artistik. Warga mendapatkan hak sosialnya atas kemerdekaan visual yang dihadirkan oleh pemerintah. Ujungnya, akan tercipta ILR yang mengedepankan etika serta estetika kota nan indah dan nyaman dipandang mata. *(Penulis adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta)-d*



Prakiraan Cuaca		Selasa, 6 April 2021				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-29	75-95
Sleman					23-29	75-95
Wates					23-30	75-95
Wonosari					23-29	75-100
Yogyakarta					23-29	75-95

Paying Customer

Laksmindra Saptyawati, S.E., M.B.A.
Sekprodi S1 Kewirausahaan Universitas AMIKOM Yogyakarta

"APA hal yang penting dan layak untuk sebuah bisnis, yang sering terlupakan?" Bukan produk, teknologi, rencana bisnis, visi, tim yang kuat, investor, atau keunggulan kompetitif. Meskipun kesemua hal tersebut bagus untuk dimiliki sebuah bisnis. Satu hal yang penting dan layak untuk

sebuah bisnis namun sering terabaikan adalah paying customer yaitu pelanggan yang bersedia membayar produk Anda. Setiap pebisnis dapat mengklaim dirinya memiliki produk dengan sistem operasional perusahaan yang lengkap, namun kalau tidak ada yang membeli produknya maka sama sekali tidak dapat dikatakan punya bisnis. Bisnis adalah tentang pelanggan Anda. Seringkali pebisnis sangat terfokus pada produk yang akan dijual namun mengabaikan sisi paling penting dalam bisnis yaitu pelanggan yang membayar atau paying customer. Pebisnis seringkali mendefinisikan sebuah bisnis sebagai 'hanya produk' dan menyusun rencana bisnis yang terfokus pada produk, mengesampingkan sisi lain yaitu bisnis dari kaca mata pelanggan.

Seharusnya pebisnis perlu memikirkan apakah ada pelanggan yang bersedia membayar produknya (who), apa yang membuat pelanggan bersedia membayar produk mereka (what), mengapa pelanggan bersedia membayar produk tersebut (why), dan bagaimana cara pelanggan membayar produk (how). Agar pebisnis dapat berjalan sejalan dengan persepsi pelanggan, maka perlu mengamati pelanggan. Mengamati pelanggan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. (1) Pilih segmen pelanggan yang ingin Anda petakan. (2) Identifikasi hal-hal yang pelanggan Anda ingin selesaikan dalam pekerjaan atau kehidupan mereka, masalah yang sedang berusaha mereka

atasi, atau kebutuhan yang mereka coba cakupi. (3) Identifikasi apa saja kesulitan yang dialami pelanggan dalam mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. (4) Identifikasi manfaat apa yang diinginkan pelanggan dari penggunaan produk yang Anda ciptakan. (5) Prioritaskan permasalahan atau kebutuhan pelanggan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi pelanggan dan manfaat yang dapat diperoleh pelanggan dari produk Anda dengan menyusun daftar tersebut di catatan operasional bisnis Anda. "Pelanggan adalah raja" sebenarnya bukan mitos. Raja di sini tentu bukan berarti pelanggan dapat berbuat seenaknya terhadap bisnis Anda, namun lebih tentang pada bagaimana

kita dapat menempatkan pelanggan sebagai fokus di arah sistem operasional perusahaan mulai dari hulu hingga ke hilir, dari perencanaan produk hingga produk berada di tangan pelanggan dan experience yang didapat pelanggan setelah menggunakan produk tersebut. Paying customer berdatangan dari beberapa arah, ada paying customer yang merupakan pelanggan baru, yang baru pertama kali ini membeli produk Anda, dan ada pula paying customer yang merupakan pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Keduanya penting untuk bisnis. Menarik pelanggan baru sama pentingnya dengan menjaga dan merawat pelanggan lama. Antara keduanya jika terbangun sinergi maka dapat tercipta bisnis yang bagus dan

berkelanjutan. Jika diperluas, dalam definisi 'pelanggan' ada pengguna akhir (yang akhirnya memakai produk Anda) dan ada pembeli ekonomi (yang membuat keputusan akhir apakah akan mendapatkan produk Anda). Pengguna akhir dan pembeli ekonomi bisa jadi adalah orang yang sama, bergantung pada situasinya. Untuk di awal bisnis, yang perlu Anda lakukan fokus terlebih dahulu di pengguna akhir sambil menyempurnakan penawaran produk dengan mulai mengamati perilaku pembeli ekonomi untuk membentuk paying customer berkelanjutan dan menghindari jebakan 'perang harga' dengan kompetitor Anda. Sekali lagi, paying customer adalah penggerak roda bisnis, tanpa paying customer bisnis menjadi tidak ada artinya. (*)

